

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia**

###### **2.1.1.1. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia merupakan pengukuran perbandingan dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak keseluruhan negara (*United Nations Development Programme, 1997*). Indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup yang diukur dengan harapan hidup, tingkat pendidikan yang diukur dengan angka huruf melek pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah, serta tingkat kehidupan layak yang diukur dengan pengeluaran per kapita (Baeti et al., 2013).

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator strategis yang banyak digunakan untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah. Dalam hal ini Indeks Pembangunan Manusia dianggap sebagai gambaran dari hasil program pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi yang sangat luas, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitas dan standar hidup layak (Bakar, 2020).

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu alternatif pengukuran pembangunan selain menggunakan Gross Domestik Bruto. Nilai Indeks Pembangunan Manusia suatu negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali) dan tingkat pengeluaran konsumsi yang telah mencapai standar hidup yang layak. Tingkat pendidikan dan kesehatan individu penduduk merupakan faktor dominan yang perlu mendapat prioritas utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Muhammad Firza Ibnu Hartono & Laelatul Khikmah, 2024)

Menurut *Human Development Report*, mengungkapkan bahwa pertumbuhan individu adalah langkah peningkatan pemilihan masyarakat. Secara prinsip, manusia memiliki pilihan yang sangat beragam dan dinamis sepanjang waktu. Namun, dalam setiap tahap perkembangan, terdapat tiga alternatif yang sangat fundamental yakni untuk mencapai usia panjang dan kehidupan yang sehat, mendapatkan pendidikan, dan juga memiliki hak gunanya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang layak, diperlukan akses terhadap sumber daya yang diperlukan. Jika ketiga elemen dasar ini tidak ada, maka tidak ada opsi lain yang bisa digunakan. Pembangunan individu memiliki dua aspek. Pertama, pengembangan kemampuan manusia seperti peningkatan kesehatan, pendidikan, dan keahlian. Selain itu, pemanfaatan kemampuan yang dimiliki, seperti cara menghibur untuk menikmati waktu senggang, guna mencapai tujuan yang berguna atau terlibat dalam aktivitas budaya, sosial dan

politik. Jika keseimbangan dalam skala pembangunan manusia tidak tercapai, ada kecenderungan terjadinya ketidakstabilan.

Indeks Pembangunan Manusia ialah indikator penting guna menghitung kesuksesan suatu negara dalam usaha meningkatkan tingkat hidup masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia menggambarkan bagaimana masyarakat mampu mengakses perolehan peningkatan dalam mencapai pendapatan kesehatan dan pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia bernilai sekitar 0 sampai 100 pada penjabaran Indeks Pembangunan Manusia yang kecil berawal dari 50 masuk kedalam kelompok rendah, Indeks Pembangunan Manusia mulai dari 50 hingga 80 termasuk kelompok sedang hingga menengah untuk Indeks Pembangunan Manusia yang termasuk kedalam kategori tinggi mulai dari 80 hingga 100 (Zarkasi et al., 2021).

Konsep Indeks Pembangunan Manusia pertama kali di publikasikan oleh *United Nations Development Programme* melalui *Human Development Report* pada tahun 1996, yang kemudian berlanjut setiap tahun. Dalam publikasi tersebut dijelaskan bahwa pembangunan manusia adalah sebagai “*a process of enlarging people’s choices*” atau proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Secara spesifik *United Nations Development Programme* menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), keberlanjutan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*) (R. P. Lestari, 2017).

Kebijakan pokok dalam upaya peningkatan kualitas hidup manusia secara lintas sektoral, diantaranya adalah:

1. Peningkatan kualitas fisik manusia (*individual fisycal quality*) yang meliputi jasmani, rohani, dan motivasi, serta kualitas kecukupan kebutuhan dasar seperti terpenuhinya gizi, sandang, perumahan dan pemukiman yang sehat.
2. Peningkatan kualitas keterampilan (*skills*) sumber daya manusia yang produktif dan upaya pemerataan penyebarannya.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan.
4. Peningkatan pranata dan penerapan hukum yang meliputi kelembagaan, perangkat, dan aparat serta kepastian hukum. Sedangkan secara sektoral, operasionalnya dilaksanakan melalui berbagai sektor pembangunan, serta lain sektor pendidikan, kesehatan sosial, kependudukan, tenaga kerja dan sektor-sektor pembangunan lainnya.

Ditegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan selama ini difokuskan kepada pembangunan-pembangunan sumber daya manusia yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Yang diharapkan bahwa pembangunan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas dasar penduduk yang dapat turut berperan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Laporan *World Economic Forum* juga mendukung pandangan ini dengan menyatakan bahwa peningkatan keterampilan dan pendidikan masyarakat di tingkat nasional dan regional berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Mereka berpendapat bahwa daerah yang memiliki kualitas

pendidikan dan kesehatan yang baik cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan stabil.

#### **2.1.1.2. Komponen Pembangunan Manusia**

Dalam Laporan Pembangunan Manusia *Human Development Report* yang diterbitkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP), Indeks Pembangunan Manusia mempunyai tiga komponen utama yaitu Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan dan Standar Hidup Layak (Yektiningsih, 2018), yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Indeks Harapan Hidup (*longevity*)

Indeks harapan hidup atau sering juga disebut lamanya hidup diartikan bahwa bertahan lebih lama dapat diukur dengan indeks harapan hidup saat lahir (*life expectancy of birth*) dan angka kematian bayi per seribu penduduk (*infant mortality rate*). Dengan menyertakan informasi tentang angka kelahiran dan kematian per tahunnya, dimana variabel tersebut diharapkan mampu mempresentasikan rata-rata lama hidup beserta hidup sehat masyarakat. Dikarenakan sulitnya mendapatkan informasi orang yang meninggal pada periode waktu tertentu, maka digunakan metode tidak langsung untuk perhitungan secara tidak langsung dilakukan berdasarkan dua data dasar yaitu rata-rata jumlah lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup dari wanita yang pernah kawin untuk mendapatkan indeks harapan hidup dengan menetapkan standar angka harapan hidup berdasarkan nilai maksimum dan minimumnya.

b. Indeks Pendidikan

Untuk menghitung Indeks Pendidikan dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia, mencakup dua parameter yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Populasi yang digunakan adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis dalam huruf latin atau huruf lainnya. Perlunya batasan tersebut agar angkanya dapat mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berumur dibawah 15 tahun masih dalam proses sekolah akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya. Kedua parameter tersebut disertakan agar mampu menggambarkan tingkat pengetahuan (gambaran angka melek huruf), dimana angka melek huruf merupakan rasio penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Sedangkan gambaran angka rata-rata lama sekolah merupakan cerminan terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

c. Standar Hidup Layak

Standar hidup layak dalam cakupan luas menggambarkan tingkat kesejahteraan yang diminati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Indeks ini menunjukkan betapa seharusnya tingkat kemampuan seseorang atau suatu keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk menjalani kehidupan yang secara layak. Untuk mengukur standar hidup layak (daya beli) *United Nations Development Programme* menggunakan *Gross National Product* riil yang di sesuaikan.

### 2.1.1.3. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

Terdapat tiga komposisi indikator yang digunakan dalam mengukur besar Indeks Pembangunan Manusia suatu Negara dalam konsep Indeks Pembangunan Manusia (Laode et al., 2020), yaitu:

- a. *Longevity*, diukur dengan variabel harapan hidup saat lahir atau *life expectancy of birth* dan angka kematian bayi per seribu penduduk atau *infant mortality rate*.
- b. *Educational achievement*, diukur dengan dua indikator yaitu melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas (*adult literacy rate*) dan tahun rata-rata bersekolah bagi penduduk 25 ke atas (*the mean years of schooling*).
- c. *Access to resource*, dapat diukur secara makro melalui *Product Domestic Bruto riil* perkapita dengan terminologi *purchasing power parity* dalam dolar AS dan dapat dilengkapi dengan tingkatan angkatan kerja.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan rata-rata dari ketiga komponen tersebut, dengan rumus:

$$\text{IPM} = \frac{X1+X2+X3}{3}$$

Dimana:

**X1** = Angka harapan hidup

**X2** = Tingkat pendidikan

**X3** = Tingkat kehidupan yang layak

Secara detail, prosedur penghitungan IPM ialah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM**

| Indikator                           | Satuan | Minimum |           | Maksimum |            |
|-------------------------------------|--------|---------|-----------|----------|------------|
|                                     |        | UNDP    | BPS       | UNDP     | BPS        |
| Angka Harapan Lama Hidup Saat Lahir | Tahun  | 20      | 20        | 85       | 85         |
| Angka Harapan Lama Sekolah          | Tahun  | 0       | 0         | 18       | 18         |
| Rata-rata Lama Sekolah              | Tahun  | 0       | 0         | 15       | 15         |
| Pengeluaran per Kapita              | Tahun  | 100     | 1.076.436 | 107.721  | 26.572.352 |

Sumber: *Badan Pusat Statistik RI*

#### 2.1.1.4. Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Menurut (Muslikhati, 2018), adapun manfaat Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

- a. Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
- b. Indeks Pembangunan Manusia menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara.
- c. Untuk negara Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan dana alokasi umum (DAU).

## **2.1.2. Dana Desa**

### **2.1.2.1. Pengertian Dana Desa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan untuk Desa yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten/Kota, diarahkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan (Rahayu, 2018).

Dana Desa digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa dengan prioritas untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Fokus utama dari penyaluran dana desa ini terletak pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya (Simangunsong et al., 2021).

Upaya dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan Dana Desa diharapkan dapat mengatasi kesenjangan pembangunan antara pedesaan dan perkotaan tidak jauh melebar. Untuk itu, diperlukan sebuah kerja keras dari berbagai unsur yang ada seperti pemerintah daerah, unsur desa dan masyarakat itu sendiri dalam mewujudkan desa mandiri. Secara umum, tujuan dari pembangunan adalah untuk menjamin sebuah keberlangsungan pembangunan sehingga menjadikan taraf hidup masyarakat desa semakin lebih baik (Azwardi, 2018).

Paradigma membangun dari pinggiran yang menjadi program pemerintah dimulai dari daerah-daerah tertinggal dan kawasan-kawasan perdesaan. Desa juga

memiliki posisi yang strategis sebagai pusat untuk merubah tatanan sosial. Dalam hal ini pemerintah memicu ketertarikan pada prosedur belanja transfer pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Semua kegiatan pemerintahan desa dalam kerangka ekonomi desa merupakan kewenangan desa, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa (Prasetyo, 2017).

Kementerian keuangan (2017) dalam Buku Saku Dana Desa menyebutkan bahwa alokasi anggaran Dana Desa berasal dari Pemerintah Pusat dan dibagikan berdasarkan keadilan dan merata sesuai dengan landasan desa. Besaran alokasi anggaran yang ditunjukan langsung ke desa di patok 10% dari dan diluar dana transfer daerah (on top) secara bertahap. Dana Desa ditentukan berdasarkan jumlah desa dan diperuntukan berdasarkan angka kemiskinan, jumlah penduduk, tingkat kesulitan geografis dan luas wilayah. Setelah desa mengumpulkan seluruh penghasilannya dari berbagai sumber, maka desa perlu melakukan penatausahaan belanja dengan baik. Penatausahaan belanja yang baik membuat desa memiliki potensi dimasa yang akan datang terhadap penghasilan asli desa, baik yang berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun berasal dari pengelolaan aset terutama sewa (Prasetyo et al., 2021).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, menyebutkan dana desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa sebagaimana yang dimaksud di prioritaskan untuk pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan diberikannya Dana Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan.

#### **2.1.2.2. Prioritas Dana Desa**

Dana Desa di prioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa merujuk pada Permendes 19 Tahun 2017 tentang prioritas Dana Desa tahun 2018, dalam bab 3 pasal 4 dinyatakan bahwa penggunaan Dana Desa mencakup lima hal sebagai berikut (Azwardi, 2018):

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
3. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan pedesaan. BUMDesa atau BUMDesa Bersama, embung, dan sarana olahraga desa sesuai dengan kewenangan desa.
4. Pembangunan sarana olahraga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola atas BUMDesa atau BUMDesa Bersama.

5. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh pemerintah Desa kepada Masyarakat Desa di ruang public yang dapat diakses masyarakat desa.

Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administrative, secara teknis dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan dan terkendali.

#### **2.1.2.3. Mekanisme Ketentuan Penyaluran Dana Desa**

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi beberapa tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer dari RKUD ke RKUDes.

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari RKUD ke RKD (Kemenkeu, 2017) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I paling cepat pada bulan januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen)
2. Tahap II paling cepat pada bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen)
3. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen)

Penyaluran dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara selaku kuasa pengguna anggaran penyaluran DAK Fisik dan dana desa menerima dokumen pernyataan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I berupa :
  - a) Surat pemberitahuan bahwa pemerintah daerah yang bersangkutan telah menyampaikan peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan.
  - b) Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa.
2. Tahap II berupa :
  - 1) Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
  - 2) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
3. Tahap III berupa :
  - 1) Laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II.
  - 2) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah Bupati/Walikota menerima dokumen pernyataan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDes dari kepala desa.
2. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari kepala desa.
3. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari kepala desa.

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah Bupati/Walikota menerima dari kepala desa: Peraturan Desa mengenai APB Desa tahun anggaran berjalan; dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebelumnya. Apabila menteri keuangan Republik Indonesia belum menerima dokumen dari Bupati/Walikota atau Bupati/Walikota belum menerima dokumen dari kepala desa.

#### **2.1.2.4. Tujuan Dana Desa**

Penyaluran Dana Desa merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Penyaluran Dana Desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Berikut tujuan dari Dana Desa (Dwi, 2022):

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa.
2. Mengentaskan kemiskinan.
3. Memajukan perekonomian desa.
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Penggunaan Dana Desa untuk bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa. Hasil musyawarah desa harus menjadi acuan bagi penyusunan rencana kerja pemerintah desa dan APBDes, rencana kerja pemerintah desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dalam peraturan desa.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program kegiatan pembangunan desa, meliputi untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan dimaksud diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs (*Sustainable Development Goals*) Desa. SDGs Desa adalah upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa antara lain dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan secara berkelanjutan (Permendes, No 7 Tahun 2023).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa menyebutkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan

wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat desa (Permendes, No 21 Tahun 2015), meliputi:

1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.
2. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDes atau dukungan BUMDes Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa.
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa (*Community Center*).
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu, poskesdes, polindes dan ketersediaan atau keberfugian tenaga medis/swamedikasi di desa.
6. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai desa dan hutan/pantai kemasyarakatan.
7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.

8. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Masyarakat Desa.

#### **2.1.2.5. Faktor-Faktor Dana Desa**

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Dana Desa, sebagai berikut(Fauzi, 2018):

1. Desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula.
2. Kesejahteraan masyarakat desa rendah.
3. Rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan.
4. Banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas.

#### **2.1.3. Hubungan Antar Variabel**

##### **2.1.3.1. Hubungan Dana Desa Terhadap IPM**

Dana Desa merupakan salah satu sumber pemasukan di desa yang diberikan oleh pemerintah dan dianggarkan setiap tahun dalam APBN. Melalui Dana Desa tersebut, pendapatan desa akan meningkat. Apabila Dana Desa dikelola dengan baik, tentu saja hal ini akan meningkatkan sarana pelayanan masyarakat dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa, dan kegiatan lain yang dibutuhkan masyarakat desa (Dwi, 2022).

Menurut Todaro menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia menggambarkan Indeks Pengembangan Manusia yang dilihat dari sisi perluasan,

pemerataan, dan keadilan baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan masyarakat. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia akan mengakibatkan rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah mengakibatkan rendahnya perolehan pendapatan, sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin (Mira Ulyati et al., 2024).

Teori Kapabilitas yang dikemukakan oleh Amartya Sen 1999, menyatakan bahwa pembangunan manusia tidak hanya diukur dari kekayaan material, tetapi dari kemampuan (kapabilitas) individu untuk mencapai hal-hal yang mereka nilai penting dalam hidup. Relevansi teori ini terhadap variabel Dana Desa dan Indeks Pembangunan Manusia adalah Dana Desa yang digunakan secara efektif dapat meningkatkan kapabilitas masyarakat desa melalui penyediaan pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang memadai, serta infrastruktur yang mendukung. Dengan demikian, Dana Desa berpotensi meningkatkan kapabilitas manusia kearah yang lebih positif sebagaimana tercermin dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Teori Kebijakan Publik merupakan salah satu teori yang sangat relevan pada penelitian ini. Seperti Teori Model Implementasi '*Bottom-up*' yang dikemukakan oleh Riant Nugroho Dwijowijoto, teori ini menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam implementasi kebijakan. Dalam konteks Dana Desa dan Indeks Pembangunan Manusia ini berarti bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat harus diserahkan pelaksanaannya kepada masyarakat desa (rakyat), dengan melibatkan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan agar Dana Desa yang

disalurkan dapat digunakan sebaik mungkin sehingga diharapkan dapat berpengaruh dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Hubungan antara Dana Desa dan Indeks Pembangunan Manusia mencerminkan sejauh mana alokasi Dana Desa yang dikeluarkan oleh pemerintah berpengaruh dalam perkembangan pembangunan manusia di daerah yang menerima Dana Desa tersebut. Secara umum, Dana Desa berfungsi untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan sosial di daerah pedesaan, yang secara langsung dapat berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Penelitian oleh Hardianto yang berjudul Pengaruh Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Bolaang Mongondow Raya, memperoleh hasil penelitian bahwa Variabel Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. (Jack et al., 2024)

Dana Desa yang berasal dari APBN diperuntukkan untuk desa yang di transfer melalui APBD yang dimanfaatkan untuk mendanai pemberdayaan penduduk, pembinaan masyarakat, pelaksanaan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintah desa. Dengan bantuan Dana Desa dan PDRB diharapkan dapat membantu meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Manusia di suatu daerah (AlFurqan, 2022). Dampak Transfer Daerah ke Dana Desa terutama Dana Desa yaitu adanya kemajuan desa-desa di Indonesia. Penurunan jumlah desa dengan status sangat tertinggal dan desa tertinggal menjadi salah satu bukti dampak positif karena adanya

program dan desa di Indonesia (Kemenkeu, 2022). Dan salah satu contoh dampak positif Dana Desa terhadap Indeks Pembangunan Manusia terjadi di Desa Ponggok, desa ini merupakan desa yang mampu mengelola dan mengimplementasikan Dana Desa dengan sangat baik. Sejak menerima Dana Desa tahun 2015, Desa Ponggok telah melakukan banyak pembangunan untuk memajukan desa, mulai dari pembangunan infrastruktur, pembangunan sanitasi dan penyediaan air bersih sampai dengan peningkatan pembangunan manusia (Kemenkeu, 2017). Hubungan ini jelas sekali menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas penggunaan Dana Desa sangat penting dalam mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Kabupaten.

## 2.2. Penelitian Sebelumnya

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Sebelumnya**

| No. | Nama Peneliti   | Nama Penelitian, Jurnal, Volume, Nomor, Tahun   | Variabel yang diteliti, Alat Analisis, Hasil Penelitian  | Persamaan   | Perbedaan   |
|-----|---|---|--|---|---|
| 1.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Muhammad Malik</li> <li>• Sylvia Sjaris</li> <li>• Didiek Handayani Gusti</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaruh Pendapatan asli Daerah, Dana alokasi Umum dan Dana Desa terhadap IPM Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.</li> <li>• Vol 3</li> <li>• No. 4</li> <li>• 2022</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PAD, DAU, Dana Desa dan IPM.</li> <li>• Regresi Data Panel.</li> <li>• Hasil Penelitian: Variabel PAD (X1) tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel IPM, Variabel DAU (X2) berpengaruh signifikan secara parsial secara negative terhadap variabel IPM, variabel Dana Desa (X3) berpengaruh signifikan secara parsial ke arah positif terhadap IPM.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel (X3): Dana Desa (Y): IPM</li> <li>• Regresi Data panel</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun penelitian: 2022</li> <li>• Variabel (X1), (X2)</li> </ul> |
| 2.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hardianto</li> <li>• Jan Jack Joll Rasubala</li> <li>• Tommi Helmiwan</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaruh Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Bolaang Mongondow Raya</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DAK, Dana Desa dan IPM</li> <li>• Regresi Data Panel.</li> <li>• Hasil penelitian: Variabel Dana Desa berpengaruh negative dan signifikan terhadap IPM sedangkan DAK Fisik</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel (X2): Dana Desa (Y): IPM</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun Penelitian: 2024</li> <li>• Variabel (X1)</li> </ul>       |

|    |   |  |   |                           |   |
|----|---|--|---|---------------------------|---|
|    |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu sosial</li> <li>• Vol 5</li> <li>• No. 6</li> <li>• 2024</li> </ul>  | berpengaruh negative tidak signifikan terhadap IPM  |                           |   |
| 3. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mira Ulyati</li> <li>• Resti Isha Palupi</li> <li>• M. Nur Fauzan</li> <li>• M. Kurniawan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaruh IPM dan Pertumbuhan Usaha Kecil (Mikro) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Papua tahun 2014-2023</li> <li>• Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah</li> <li>• Vol. 2</li> <li>• No. 2</li> <li>• 2024</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IPM, Pertumbuhan Usaha Kecil, Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>• Alat analisis: Regresi Berganda</li> <li>• Hasil Penelitian: IPM tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan pertumbuhan usaha kecil (mikro) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.</li> </ul>                               | • Variabel (X1): IPM      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alat Analisis: Regresi Berganda</li> <li>• Variabel (X2) dan (Y)</li> </ul>  |
| 4. | • Depi Rahayu   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang.</li> <li>• Economics Development Analysis Journal.</li> <li>• Vol. 6</li> <li>• No. 2</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>• Alat analisis SWOT.</li> <li>• Hasil Penelitian: Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalikayen ini sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana desa namun hasil dari pengelolaan dana desa tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> </ul> | • Variabel (X) Dana Desa. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun Penelitian: 2017</li> <li>• Alat Analisis SWOT.</li> <li>• Variabel (Y) Kesejahteraan Masyarakat.</li> </ul> |

|    |  |  |  |  |   |
|----|--|--|--|--|---|
|    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2017</li> </ul>   |  |  |   |
| 5. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sixson Roberto Simangunsong</li> <li>• Ahmad Albar tanjung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis Dampak Dana Desa dan PDRB Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tapanuli Tengah.</li> <li>• Journal of Business and Economics Research (JBE).</li> <li>• Vol. 2</li> <li>• No. 1</li> <li>• 2021</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana Desa, PDRB dan IPM.</li> <li>• Alat Analisis: Regresi Data Panel time series.</li> <li>• Hasil Penelitian: Secara parsial dana desa berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap IPM, sementara PDRB pengaruhnya adalah positif dan signifikan terhadap ipm di Kabupaten tapanuli Tengah namun secara simultan kedua variabel tersebut secara bersama sama berpengaruh positif terhadap ipm di kabupaten Tapanuli Tengah.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel (X1) Dana Desa dan Variabel Y (IPM).</li> <li>• Regresi Data Panel time series.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel (X2) PDRB.</li> <li>• Tahun penelitian 2021.</li> </ul>   |
| 6. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abu Bakar</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mimika</li> <li>• Jurnal Kritis.</li> <li>• Vol. 4</li> <li>• No. 2</li> <li>• 2020</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah dan IPM</li> <li>• Analisis Regresi Berganda</li> <li>• Hasil Penelitian: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga berpengaruh signifikan terhadap IPM di Kabupaten Mimika, Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di Kabupaten Mimika, Kedua variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel (Y) Indeks Pembangunan Manusia</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun Penelitian: 2020</li> <li>• Alat Analisis; Regresi Berganda</li> <li>• Variabel (X1) dan (X2)</li> </ul> |

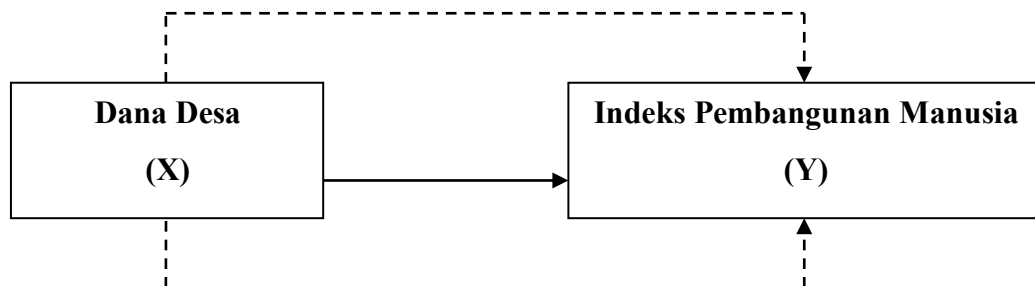
|    |   |  |  |   |   |
|----|---|--|--|---|---|
|    |   |  | IPM di Kabupaten Mimika.   |   |   |
| 7. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Magdalena Laode</li> <li>• Daisy S.M Engka</li> <li>• Jacline I. Sumual</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor pendidikan Terhadap Indeks pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara 2015-2018.</li> <li>• Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi.</li> <li>• Vol. 20</li> <li>• No. 2</li> <li>• 2020</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Pengeluaran pemerintah dan IPM</li> <li>• Alat Analisis: Regresi Data Panel</li> <li>• Hasil Penelitian: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, kemiskinan berpengaruh negative dan signifikan terhadap IPM, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh negative dan signifikan terhadap IPM.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel (Y) IPM.</li> <li>• Alat Analisis: Regresi Data panel.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun penelitian: 2020</li> <li>• Variabel (X1), (X2) dan (X3).</li> </ul> |
| 8. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zarkasi Rifka Nurfaiza</li> <li>• Sifriyani</li> <li>• Surya pranga</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Menggunakan Regresi Panel</li> <li>• Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan</li> <li>• Vol. 15</li> <li>• No. 2</li> <li>• 2021</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks pembangunan manusia</li> <li>• Alat Analisis; Regresi data panel</li> <li>• Hasil Penelitian: Faktor faktor yang mempengaruhi IPM di Kalimantan adalah angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan pengeluaran perkapita.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Pembangunan Manusia</li> <li>• Regresi data panel</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun Penelitian: 2021</li> </ul>  |
| 9. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rizky Prima Yoga</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaruh Program Dana Desa terhadap Tingkat Kesejahteraan</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana Desa, Tingkat Kesejahteraan Masyarakat</li> <li>• Alat Analisis: Regresi Data Panel</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel (X1): Dana Desa</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun Penelitian: 2020</li> </ul>  |

|     |  |   |  |  |  |
|-----|--|---|--|--|--|
|     |  | <p>Masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skripsi</li> <li>• 2020</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil Penelitian: Program Dana Desa berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan. Artinya tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan dapat meningkat dengan adanya program dana desa.</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel (Y)</li> </ul>           |
| 10. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artha Graciela Pandiangan</li> <li>• Dominic Savio Priyarsono</li> <li>• Mutiara Probokawuryan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaruh Dana Desa terhadap Kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Desa Kota di Indonesia</li> <li>• Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan</li> <li>• Vol 10</li> <li>• No. 2</li> <li>• Desember 2021</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana Desa dan IPM</li> <li>• Regresi data panel</li> <li>• Hasil Penelitian: Dana Desa berpengaruh negative terhadap IPM yang diwakilkan oleh angka harapan hidup, kesenjangan rata-rata lama sekolah, dan pendapatan perkapita</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel (X1): Dana Desa dan</li> <li>• Variabel (Y): Indeks Pembangunan Manusia</li> <li>• Data: Regresi Data Panel</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun Penelitian: 2021</li> </ul> |

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan secara garis besar mengenai penelitian yang akan dilakukan, oleh karena itu kerangka pemikiran harus disajikan secara ringkas namun jelas. Kerangka pemikiran berikut menggambarkan 2 variabel penelitian. Variabel Independen atau variabel yang mempengaruhi yaitu Dana Desa dan variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi yaitu Indeks Pembangunan Manusia.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa desa memiliki modal yaitu berupa Dana Desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dana ini dialokasikan khusus untuk membangun desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Besar harapan pemerintah terhadap Dana Desa yang diberikan mampu mempengaruhi pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia ke arah yang lebih baik bagi daerah tersebut. Secara singkat, hal tersebut digambarkan dalam kerangka pemikiran berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

—————> : Parsial      - - - - -> : Bersama-sama

#### **2.4. Hipotesis**

Menurut Yusuf, A. M (2016) secara harfiah hipotesis dapat diartikan sebagai sesuatu pernyataan yang belum merupakan suatu tesis; suatu kesimpulan sementara; suatu pendapat yang belum final, karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan dari masalah kerangka pemikiran pada pembahasan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga Variabel Dana Desa akan berpengaruh signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 baik secara parsial maupun bersama-sama.